

Optimalisasi Pelayanan Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pelestarian Nilai-Nilai Pancasila (Studi Kasus di Kalimantan Timur)

Bere Ali

BPSDM Provinsi Kalimantan Timur

Berealii1959@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT / ABSTRAK

Article history

Received:
April 17, 2022

Revised:
Juli 3, 2022

Accepted:
Oktober 1, 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pelayanan ASN dalam upaya pelestarian nilai-nilai Pancasila. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kuesioner kepada 40 orang responden ASN muda serta wawancara dengan 10 orang tokoh di Kalimantan Timur sebagai narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan ASN di Kalimantan Timur belum memadai baik dari aspek instrumen pelayanan maupun aspek sikap dalam pelayanan. Baik buruknya pelayanan ASN menentukan baik buruknya citra pemerintah. Sekaligus menentukan kuat dan lemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Secara umum pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan ASN sudah memadai. Namun demikian pada kalangan ASN muda sudah mulai tergerus dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Hal ini dapat dilihat sebanyak 15% ASN menyatakan ragu-ragu dan tidak yakin Pancasila bisa bertahan di tengah gempuran ideologi asing. Dan 20% menyatakan ragu-ragu dan tidak yakin peristiwa 30 September 1965 didalangi oleh PKI. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas ASN melalui kegiatan diklat. Peningkatan dalam bidang pelayanan adalah pemenuhan instrumen pelayanan pada masing-masing unit kerja. Kemudian dilanjutkan dengan diklat pembentukan sikap yang baik agar pelayanan berjalan efektif dan efisien. Sedangkan peningkatan pengamalan nilai-nilai Pancasila adalah dengan diklat-diklat ke-Pancasila-an yang sesuai dengan situasi kekinian. Diklat yang memuat nilai-nilai "ASN BerAKHLAK" diyakini mampu meningkatkan kapasitas ASN dalam pelayanan sekaligus sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Disarankan agar diklat wajib PNS sebanyak 20 jammal per tahun perlu dimasukkan materi ke-Pancasila-an sebanyak 10% atau 2 jammal. Kepada BPIP diharapkan segera melaksanakan diklat tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan pejabat dan ASN.

This study aims to find out how to optimize ASN services in an effort to preserve Pancasila values. The method used was a qualitative approach with questionnaires to 40 young ASN respondents and interviews with 10 figures in East Kalimantan as resource persons. The results showed that ASN services in East Kalimantan were inadequate both in terms of service instruments and attitudes in service. The good and bad of ASN's services determines the good and bad of the government's image. At the same time, it determines the strength and weakness of the practice of Pancasila values in the midst of society. In general, the practice of Pancasila values among ASNs is adequate. However, among young ASNs, it has begun to erode compared to the previous generation. This can be seen as many as 15% of ASN expressed doubt and were not sure that Pancasila could survive amid the onslaught of foreign ideologies. And 20% expressed doubt and were not sure the events of September 30, 1965 were masterminded by the PKI. Therefore, it is necessary to increase the capacity of ASN through training activities. Improvement in the field of service is the fulfillment of service instruments in each work unit. Then continued with training to form a good attitude so that the service runs effectively and efficiently. Meanwhile, the improvement of the practice of Pancasila values is with Pancasila trainings that are in accordance with the current situation. Training that contains the values of "ASN BerAKHLAK" is believed to be able to increase the capacity of ASN in service as well as the practice of Pancasila values in the midst of society. It is recommended that the mandatory training of civil servants as much as 20 hours of training per year needs to be included in the Pancasila material as much as 10% or 2 hours. BPIP is expected to immediately carry out training on the practice of Pancasila values among officials and ASN.

This is an open access article under the CC-BY-SA license.



Kata Kunci: Pelayanan ASN, pelestarian Pancasila, BerAKHLAK

Keywords: ASN service, Pancasila preservation, BerAKHLAK

1. Pendahuluan

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah ujung tombak pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok mereka berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Sehingga dapat dikatakan bahwa ASN adalah pemerintah. Setiap ASN telah ditetapkan tugas pokok sesuai keahlian yang dimiliki. Mereka bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok kepada atasan secara berjenjang.

Karena pemerintah juga memiliki tanggungjawab untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila, maka secara otomatis ASN dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat harus dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Perilaku ASN baik sebagai pejabat struktural, fungsional maupun pelaksana dalam memberikan pelayanan harus selalu dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial. Banyak pejabat maupun pelaksana yang tidak menyadari peran pelestarian nilai-nilai Pancasila tersebut. Korupsi, kolusi dan nepotisme adalah perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Demikian juga tentang penyimpangan perilaku seperti tidak disiplin, tidak ramah, lambat dalam memberikan pelayanan dan sebagainya.

Menurut (Azra, 2012), Indonesia kelihatannya termasuk ke dalam multikulturalisme kedua dan keempat. Di Indonesia, pada dasarnya terdapat kultur dominan baik dalam konteks budaya, politik, etnis dan agama; tetapi pada dasarnya kultur dominan memberikan akomodasi bagi kultur lain untuk mengekspresikan dirinya. Juga terjadi proses interaksi yang cukup intens antara kultur dominan dengan kultur-kultur lain, yang pada gilirannya memunculkan sebuah "supra cultur" yang sederhana dapat dinisahkan kepada kultur Indonesia-kultur nation-state Indonesia. ASN sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 adalah: "...pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah". Selanjutnya pada ayat (2): "Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan". Dengan demikian ASN memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu ASN harus memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan bangsa berdasarkan Pancasila.

Menurut Garry Dessler (2011:5) menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek "manusia" atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan, dan penilaian. Menurut Sudewo, E. (2011) Kementerian Pendidikan Nasional telah merumuskan 18 nilai karakter yang akan ditanamkan dalam diri peserta didik sebagai upaya membangun karakter bangsa, yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan dan nasionalisme, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli social, dan tanggung jawab.

Dewasa ini muncul kekhawatiran bahwa Pancasila tidak lagi dirawat dengan baik. Pancasila tidak lagi berkembang bersama Indonesia dalam menyongsong masa depannya. Cara pandang masyarakat awam terhadap pelaksanaan Pancasila tercermin dalam perilaku pejabat dan ASN (John, 1995).. Saat ini ada fenomena bahwa ada ASN dan pejabat yang tidak mengamalkan Pancasila dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Perilaku ASN seperti itu akan dicontoh oleh masyarakat, sehingga masyarakat pun semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak lagi menjadi pandangan hidup, tidak lagi menginspirasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Atas dasar itu, maka permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah: (1) Apa saja masalah-masalah pelayanan ASN yang terjadi di tengah-tengah masyarakat? (2) Bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan ASN? (3) Bagaimana peningkatan kapasitas ASN dalam upaya pelestarian nilai-nilai Pancasila?

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi di kalangan ASN. Bagaimana perilaku mereka dalam melaksanakan pelayanan dalam upaya pelestarian nilai-nilai Pancasila. Upaya mendeskripsi pelayanan ASN dalam hubungannya dengan pelestarian nilai-nilai Pancasila ditelaah dengan menggunakan teknik kuesioner dan wawancara (*interview*).

Menurut Moleong, L. J. (2007), Penelitian adalah sebuah proses langkah demi langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita tentang topik atau isu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara dengan instrumen kunci (*key instrument*) adalah penulis sendiri. Adapun responden dalam penelitian ini adalah: (1) Para CPNS peserta Latsar Prov. Kaltim tahun 2021 sebanyak 40 orang: a. Pemprov Kaltim 12 orang, b. Kota Samarinda 5 orang, c. Kota Balikpapan 4 orang, d. Kabupaten Berau 6 orang, e. Kabupaten Paser 4 orang, f. Kabupaten Mahulu 3 orang, g. Kabupaten Kukar 2 orang, h. Kabupaten Kutim 3 orang, i. Kabupaten Kubu 1 orang. Responden dipilih secara random pada masing-masing unit kerja, sehingga setiap unit kerja diwakili 1 (satu) orang. (2) Para tokoh

pemerintahan, tokoh pendidik, dan tokoh masyarakat Kaltim sebagai narasumber sebanyak 10 (sepuluh) orang, yaitu: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kaltim, Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Prov. Kaltim, Kepala Kesbangpol Prov. Kaltim, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim, Kepala BKD Prov. Kaltim, Rektor IKIP PGRI Kalimantan Timur, Dekan FIP IKIP PGRI Kalimantan Timur, Dekan FPIPS IKIP PGRI Kalimantan Timur, Widya Iswara Ahli Utama BPSDM, Wartawan Senior Kaltim

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

3.1.1. Analisis Pelayanan ASN

Data awal yang diperoleh adalah jenis pelayanan yang diperoleh responden selama tahun 2020. Ada 12 jenis pelayanan yang ditanyakan, dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 1. Pelayanan yang diurus oleh responden tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Responden	Keterangan
1.	SIM Baru	15	37,50%
2.	SIM (Perpanjangan)	21	52,50%
3.	KTP	32	80,00%
4.	KK	32	80,00%
5.	Izin Usaha	2	5,00%
6.	Akta Tanah	4	10,00%
7.	Pelayanan Faskes	35	87,50%
8.	IMB	3	7,50%
9.	Akta Kelahiran	12	30,00%
10.	Sambungan Listrik	8	20,00%
11.	Sambungan PDAM	6	15,00%
12.	Pendaftaran Siswa Baru	27	67,50%

Responden yang dalam penelitian ini berstatus sebagai CPNS juga ditanya tentang ketersediaan instrumen pelayanan publik pada unit kerja mereka, dengan data sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. Ketersediaan instrumen pelayanan unit kerja

No.	Jenis Instrumen Pelayanan	Ada	Tidak Ada	Ket.
1.	Standar Pelayanan (SP)	25	15	40
2.	Maklumat Pelayanan	0	40	40
3.	Jangka Waktu Pelayanan	12	28	40
4.	Ketentuan Biaya Pelayanan	8	32	40
5.	Kotak Saran	23	17	40
6.	Nomor Kontak Hotline	30	10	40
JUMLAH		98	142	240

Tabel 3. Keberfungsian instrumen pelayanan unit kerja

No.	Jenis Instrumen Pelayanan	Berfungsi	Tidak Berfungsi	Jumlah
1.	SOP	11	14	25
2.	Maklumat Pelayanan	0	0	0
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2	10	12
4.	Ketentuan Biaya Pelayanan	3	5	8
5.	Kotak Saran	4	19	23
6.	Nomor Kontak Hotline	7	23	30
JUMLAH		27	71	98

Tabel 4. Sikap dalam pelayanan

No.	Sikap Pelayanan	Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	Ket.
1.	Santun dan Ramah	0	9	20	11	40
2.	Terbuka	3	5	22	10	40

3.	Cermat	5	14	12	9	40
4.	Jujur	0	13	15	12	40
5.	Adil	5	12	20	3	40
6.	Cepat Tanggap	8	17	8	7	40
	JUMLAH	21	70	97	52	240

Jika persepsi responden tersebut dikonfirmasi dengan pendapat para tokoh yang menjadi narasumber dalam penelitian ini (10 orang), dapat dilihat pada topik-topik berikut:

Topik tentang pelayanan ASN menunjukkan citra pemerintah. Pada topik ini semua narasumber menyatakan “ya” walaupun dengan narasi yang berbeda. Contoh yang dikemukakan oleh Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Nina Dewi (ND):

“Iya, pelayanan ASN menunjukkan citra pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Karena ASN merupakan aparatur pemerintah yang mempunyai tugas/bekerja pada instansi pemerintah dan memberikan pelayanan yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Artinya bahwa baik buruknya pelayanan menentukan baik buruknya citra pemerintah di tengah-tengah masyarakat.

Topik tentang keadaan pelayanan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pelayanan. Tanggapan narasumber sebanyak 4 orang menyatakan “sudah baik”, 5 orang menyatakan “sebagian besar sudah baik”, dan 1 orang menyatakan “jauh dari harapan”. Yang menyatakan jauh dari harapan adalah wartawan senior Kaltim Syarifuddin Hs (SHs) sebagai berikut:

“Mayoritas masih jauh dari harapan apalagi sempurna. Bahkan sampai muncul ungkapan sinis bahwa konon umumnya ASN itu bersikap: Jika dapat diperlambat, mengapa harus dipercepat. Oleh karena itu, sebagai contoh saja, kerap terjadi pengurusan dokumen, terutama pengurusan perizinan yang mestinya dapat selesai dalam tempo 5 hari kerja bisa molor hingga 10-15 hari kerja. Nah, lantaran warga yang mengurus izin usaha dsb itu ingin selekasnya urusan tersebut selesai, maka terbukalah peluang bagi ASN untuk menikmati saat2 yang penuh “hadiah” alias “susu ultra”, “subsidi langsung untuk lancarkan transaksi” alias suap. Ringkasnya, meski pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara terus menerus melakukan pemberhan atas etos kerja dan perilaku ASN dalam melayani, toh perbaikan itu belumlah merata dan ASN masih harus menerima cemo'oh sebagai pengangguran terselubung”.

Meskipun sebagian besar menyatakan bahwa pelayanan oleh lembaga pelayanan sudah baik, namun pendapat (SHs) perlu menjadi perhatian sebab pameo kalau bisa diperlambat mengapa harus dipercepat masih begitu kuat di tengah-tengah masyarakat.

Topik tentang fenomena ASN memperlambat pelayanan. Semua narasumber menyatakan pernah menemukan ASN yang memperlambat pelayanan. Contoh pendapat Didy Rusdiansyah (DR) selaku Kepala BKD Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

“Pernah dan dapat saja terjadi di mana-mana, kalau unsur pengawasannya lemah”.

Pendapat ini menunjukkan bahwa fenomena ASN memperlambat pelayanan akan selalu terjadi jika tidak dilakukan pengawasan yang terus menerus.

Topik tentang apakah ASN sudah maksimal dalam melaksanakan pelayanan? Para narasumber umumnya menyatakan bahwa belum maksimal dan perlu terus ditingkatkan sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad Jauhar Efendi (MJE) Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kaltim sebagai berikut:

“Belum maksimal. Karena masih saja ditemui, adanya kelambatan dalam memberikan pelayanan. Bahkan, kadang-kadang info yang diberikan kepada masyarakat tidak tepat, karena tidak memiliki data base yang kuat”.

Belum maksimalnya pelayanan ASN antara lain adanya kelambatan dan tidak tepat waktu. Hal ini membuat urusan masyarakat menjadi terbengkalai sehingga memunculkan sikap kesal, jengkel, frustrasi, pekerjaan yang lain tertunda, dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik oleh ASN di Kalimantan Timur belum memadai, baik dari aspek instrumen pelayanan maupun aspek sikap dalam pelayanan. Akibatnya adalah citra pemerintah menjadi buruk.

3.1.2. Analisis Pelestarian Pancasila

Data tentang persepsi responden terkait hubungan pelayanan dengan pelestarian nilai-nilai Pancasila sebagai berikut:

Tabel 5. Hubungan pelayanan dengan pelestarian nilai-nilai pancasila

No.	Indikator	Ya	Tidak
1.	Apakah pelayanan ASN ada hubungannya dengan pelestarian nilai-nilai Pancasila?	40	0
2.	Apakah pelayanan ASN yang baik kepada masyarakat dapat dianggap sebagai pelestarian nilai-nilai Pancasila?	40	0
3.	Apakah pelayanan ASN yang buruk dapat merusak citra pemerintah dan Pancasila?	40	0
JUMLAH/RATA-RATA		120/40	0/0

Tanggapan responden di atas senada dengan pernyataan para narasumber bahwa pelayanan ASN ada hubungannya dengan pelestarian nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang dinyatakan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur Sufian Agus (SA) sebagai berikut:

“Sudah pasti ada, karena sebagai negara dengan falsafah Pancasila, segala tindak tanduk dan perbuatan masyarakat dari tingkat atas hingga lapisan bawah harus mencerminkan kehidupan berpancasila sebagai ideologi dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Karena itu, segala yang dilakukan ASN dalam melaksanakan tugas dan menjalani kehidupan sehari-hari harus berdasarkan Pancasila. Karena sebagai abdi negara, ASN harus mampu menjadi contoh bagi warga lain di lingkungan tempat tinggal masing-masing, tentang bagaimana menjalankan kehidupan bertetangga berdasarkan nilai-nilai Pancasila”.

Data berikut adalah tentang keyakinan responden terkait kemampuan Pancasila bertahan di tengah gempuran ideologi asing dan keyakinan atas peristiwa G30S/PKI, yaitu:

Tabel 6. Hubungan pelayanan dengan pelestarian nilai-nilai pancasila

No.	Indikator	Yakin	Ragu-Ragu	Tidak Yakin
1.	Pancasila bisa bertahan di tengah gempuran ideologi asing	34 (85%)	2 (5%)	4 (10%)
2.	Peristiwa 30 September 1965 didalangi oleh PKI	30 (75%)	3 (5%)	8 (20%)

Hal ini berbeda dengan pandangan para tokoh yang menjadi narasumber. Pada topik apakah Indonesia bisa memiliki ideologi lain selain Pancasila? Mereka pada umumnya menyatakan tidak bisa. Salah satu tokoh yaitu Suriansyah Hage (SH) selaku Rektor IKIP PGRI Kalimantan Timur menyatakan sebagai berikut:

“Indonesia itu terdiri dari berbagai agama, suku, budaya dan bahasa sehingga tidak ada ideologi yang bisa menyatukan itu selain Pancasila, oleh karena memang Pancasila pada saat dijadikan sebagai dasar negara sudah melalui proses dan perdebatan yang sangat panjang serta melibatkan banyak tokoh-tokoh di dalamnya”.

Semua narasumber sepakat bahwa hanya Pancasila yang bisa mempersatukan Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Oleh karena itu Pancasila harus terus menerus dilestarikan sebagaimana pendapat oleh Tejo Suparno (TS) selaku Dekan FIP IKIP PGRI Kaltim sebagai berikut.

“Sangat perlu pelestarian nilai Pancasila terhadap seluruh warga negara dan khususnya untuk ASN yang langsung melayani masyarakat secara luas”.

Pelestarian Pancasila perlu dilakukan kepada seluruh warga negara bukan hanya kepada para ASN. Pelestarian Pancasila harus dilaksanakan secara masif sebagaimana di jaman Orde Baru, namun metode yang digunakan harus berubah sesuai dengan kondisi kekinian.

3.1.3. Peningkatan Kapasitas ASN

Narasumber dalam penelitian ini satu kata, bahwa para ASN perlu peningkatan kapasitas melalui diklat. Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, pasal 2: “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dengan memedomani pasal tersebut jelas bahwa pelaksanaan pendidikan di Indonesia maupun pendidikan bagi warga negara Indonesia di luar negeri harus mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, dan secara yuridis sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Menurut Nana (2013) dalam Jurnal Edukasi mengatakan bahwa mengajar mencakup segala kegiatan menciptakan situasi agar para siswa belajar. Pengertian mengajar ini cukup luas, mencakup pula upaya guru mendorong siswa agar belajar, menata ruang dan tempat duduk siswa, mengelompokkan siswa, menciptakan berbagai kegiatan kelompok, memberikan berbagai bentuk tugas, membantu siswa-siswi yang lambat, memberikan pengayaan kepada siswa yang pandai, dan lain-lain.

Pelestarian nilai-nilai Pancasila di dalam dunia pendidikan dijelaskan dalam pasal 3: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab".

Terkait dengan hal ini Muchlis Syahrani (MS) selaku widya iswara ahli utama BPSDM Prov. Kaltim mengemukakan pendapatnya tentang peningkatan kapasitas ASN sebagai berikut:

"Perlu diklat khusus tentang Pancasila seperti masa lalu dengan penataran. Kiranya kewajiban 20 jamlat per tahun bagi setiap ASN bisa dialokasikan 10% atau 2 jamlat tentang ke-Pancasila-an".

MS menegaskan tentang pentingnya diklat ke-Pancasila-an sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 20 Tahun 2003. Jadi, diklat wajib ASN 20 jamlat per tahun perlu diisi materi ke-Pancasila-an sebanyak 10% atau 2 jamlat. Pendapat lain dikemukakan oleh Anwar Sanusi (AS) selaku Kepala Dinas Dikbud Prov. Kaltim bahwa yang terpenting adalah pembinaan ASN dalam pelaksanaan tugasnya, sebagai berikut:

"Di awal jabatannya sebagai ASN yaitu pada saat Pendidikan Prajabatan setiap ASN selalu diberi materi tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu ketika dalam perjalanan karirnya pengamalan Pancasila cukup dilakukan dengan cara pengamatan dan pemantauan dalam perilaku sehari-hari. Penghargaan dan sanksi bagi ASN dalam mengemban tugas sudah diatur dengan jelas".

ASN mengisyaratkan bahwa peningkatan kapasitas ASN tidak hanya melalui diklat, tetapi yang perlu diperhatikan adalah pengamatan dan pemantauan perilaku sehari-hari. Di sini peran pimpinan cukup strategis. Bilamana ada ASN melakukan pelayanan yang buruk atau berperilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, harus mendapatkan sanksi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas ASN adalah hal mutlak yang perlu dilakukan secara terus menerus (Haryatmoko, 2011)..

3.2. Pembahasan

Sintesis adalah rangkuman dari berbagai jenis sumber rujukan yang diambil oleh peneliti sesuai dengan arah pemikiran yang sedang dikembangkannya sehingga menghasilkan ide, gagasan, dan pendapat baru yang bersifat ilmiah (novelty).

Adapun sintesis hasil penelitian ini sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1. Pola sintesis temuan hasil penelitian

3.2.1. Optimalisasi Pelayanan Aparatur Sipil Negara

Narasumber dan ASN muda yang menjadi responden dalam penelitian ini sepakat bahwa pelayanan harus dilakukan secara optimal (Hasiara, 2013). ASN adalah lini terdepan dalam melaksanakan pembangunan. Mereka setiap hari melaksanakan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Mereka berhadapan dengan masyarakat sebagai wujud kehadiran negara. Citra negara dan pemerintah di hadapan masyarakat ditentukan oleh ASN. Baik dan buruknya perilaku pelayanan ASN menentukan baik dan buruknya negara dan pemerintah di hadapan masyarakat (Helmy & Jamil, 2020). Argumentasi ini memberi gambaran bahwa ASN memiliki peranan yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3.2.2. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan adalah cara yang tepat membentuk ASN agar optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Suci & Jamil, 2019). Diklat untuk ASN sudah memiliki landasan hukum yang kuat yaitu UU

Nomor 5 Tahun 2014 dan Perkalan Nomor 10 Tahun 2018. Setiap ASN disediakan diklat Latsar untuk CPNS, diklat fungsional, diklat PKP, PKA, PKN, dan berbagai jenis diklat lainnya. Ada diklat yang dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara diklat, dan adapula yang diselenggarakan secara mandiri oleh instansi (*in-house training*). Diklat-diklat tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ASN agar memiliki kemampuan teknik, manajerial, sosiokultural, dan pemerintahan.

Dalam kurikulum Latsar, PKP, PKA, dan PKN diagendakan materi pelestarian nilai-nilai Pancasila seperti: nasionalisme, wawasan kebangsaan, etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Sedangkan diklat-diklat lainnya tidak diagendakan materi ke-Pancasila-an. Dari segi frekuensi ini belum cukup sebab seseorang hanya mendapatkan materi ke-Pancasila-an maksimal sebanyak lima kali yaitu: Latsar saat menjadi CPNS, PKP saat menduduki jabatan eselon IV, PKA saat menduduki jabatan eselon III, PKN II saat menduduki jabatan eselon II, dan PKN I saat menduduki jabatan eselon I. Bila seseorang hanya sampai menduduki jabatan eselon IV, maka selama menjadi PNS hanya mendapatkan materi ke-Pancasila-an sebanyak dua kali yaitu saat Latsar dan PKP. Dari sisi frekuensi ini belum cukup untuk membentuk seseorang agar benar-benar Pancasialis dalam melaksanakan tugasnya.

3.2.3. ASN BerAKHLAK

ASN BerAKHLAK adalah *core value* ASN yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021. Pada waktu yang bersamaan juga diluncurkan *employer branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa”. Keduakeduanya adalah nilai-nilai dasar bagi ASN. Presiden menegaskan bahwa setiap ASN harus memegang teguh satu nilai dasar dan semboyan yang sama.

3.2.4. Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila

Melalui penelitian ini responden dan narasumber sepakat bahwa pelayanan yang dilakukan oleh ASN adalah gambaran citra pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya mereka menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pelayanan ASN dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Artinya, bahwa ASN yang melaksanakan pelayanan yang baik berarti telah melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya perilaku ASN yang tidak baik dalam memberikan pelayanan berarti merusak nilai-nilai Pancasila.

3.2.5. Pancasila Lestari

Tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai Pancasila itu indah. Keindahan tersebut tampak pada adanya toleransi dalam kehidupan beragama termasuk toleransi kepada mereka yang memiliki kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa, menghormati nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, menghargai musyawarah dan mufakat, serta berusaha mewujudkan keadilan sosial.

ASN sebagai garda terdepan dalam pelayanan dengan profesi apapun dan bidang tugas apapun harus mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila akan berdampak pada terganggunya kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau pada tahun 1948 hingga tahun 1965 Pancasila digangu oleh PKI, maka bentuk gangguan Pancasila di masa depan akan semakin kompleks.

4.1. Kesimpulan

Masalah-masalah pelayanan ASN yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah: a. Instrumen pelayanan pada unit kerja yang belum memadai. b. Sikap dalam pelayanan belum terimplementasi secara baik. Pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan ASN sebagai berikut: a. Pelayanan ASN yang belum memadai berpengaruh pada citra pemerintah dan melemahkan nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat. b. Pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan ASN muda tidak sekuat generasi sebelumnya.

4.2. Saran

Pelayanan ASN yang dinilai belum memadai perlu perhatian serius setiap pimpinan unit kerja untuk melakukan pembenahan pada aspek instrumen pelayanan maupun sikap dalam pelayanan. Diklat selain Latsar CPNS, PKP, PKA, dan PKN perlu memasukkan materi tentang ke-Pancasila-an minimal 10% di dalam kurikulumnya. BPIP perlu segera melaksanakan diklat ke-Pancasila-an dengan sasaran utama para pejabat dan ASN.

Daftar Referensi

- Azra, A. (2012). Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Melenium III. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Dessler, G. (2011), Manajemen SDM: buku 1. Jakarta: Indeks
- Sudewo, E. (2011). Best Practice Character Building Menuju Indonesia Lebih Baik. Jakarta. Penerbit Republika.
- Hasiara, L. O. (2013). Sikap dan Perilaku Aparatur dalam Melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Butas, University of Muhammadiyah Malang

- Haryatmoko. (2011). Etika Publik, Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Helmy, Z. & Jamil, A. S. (2020). Restrukturisasi Sistem Pelatihan Kepemimpinan dalam Membentuk Calon Pemimpin Masa Depan: Pendekatan Studi Literatur. *AgriHumanis: Journal of Agriculture and Human Resource Development Studies*, 1(1): 17.
- John, A. (1995). How to Develop a Powerful Personality: Menegakkan Integritas Diri Menyempurnakan Kepribadian. Terjemahan oleh Ari Kristanti. Surabaya: PORTICO Publishing.
- Moleong, L. J. (2007) / Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nana, R. (2013). Etika dan Integritas, Jakarta. SBM Publishing.
- Suci, Y. T. & Jamil, A. S. (2019). Hubungan Tingkat Kepuasan Pelayanan dengan Keberhasilan Peserta Pelatihan Teknis bagi Penyuluh Pertanian. *Hexagro Jurnal*, 3(2): 47-55